

BERANI RUGI: SEBUAH CERITA PEMIHAKAN PEMKAB BANTUL TERHADAP NASIB PETANI

Pajar Hatma Indra Jaya dan Sulistyary Ardiyantika¹

Abstrak

Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi miskin. Oleh karena itu membantu petani bisa diartikan sebagai usaha pengentasan kemiskinan dan upaya melindungi kelompok yang lemah. Kesejahteraan petani tergantung dengan hasil panen dan harga komoditas. Tetapi seringkali terjadi, ketika petani memperoleh hasil panen yang melimpah, petani tetap saja tidak sejahtera karena harga penjualan produksi mereka sangat murah. Biaya produksi lebih mahal dari harga jual, akibatnya petani merugi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi petani, salah satunya dilakukan oleh Pemkab Bantul dengan membuat kebijakan unik, yaitu membeli produk pertanian dengan harga melebihi harga pasaran ketika harga komoditas pertanian turun. Kebijakan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002 dan tetap dilaksanakan sampai saat ini. Meskipun pemkab membeli dengan cara merugi toh kebijakan tersebut sampai sekarang tidak membuat mereka bangkrut.

Kata Kunci: Petani, Harga Murah, Kebijakan Pasca Panen.

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun sektor ini dianggap tidak menarik lagi. Hal ini nampak dari banyaknya komoditas pertanian Indonesia yang

¹ Dr. Pajar Hatma Indra Jaya adalah sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, F. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga dan Sulistyary Ardiyantika merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

harus disediakan dengan cara impor, angka konversi lahan pertanian yang tinggi, dan ketidaksediaan anak petani untuk meneruskan pekerjaan ayah mereka (Agnes Sunartiningsih, 2004: 63, 203; Pajar Hatma Indra Jaya, 2003).

Situasi di atas juga terjadi di Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten di D.I Yogyakarta yang mempunyai potensi unggul dalam bidang pertanian. Wilayah ini mempunyai kontur tanah yang relatif datar, subur, curah hujan teratur, dan juga mempunyai kesediaan air yang cukup. Lahan pertanian di Bantul juga masih cukup luas, yaitu mencapai 15.910 hektar. Dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani, maka sektor pertanian merupakan sektor yang tidak dapat diabaikan begitu saja (<http://www.bantulonline.com/2011/07/areal-pertanian-bantul-capai-15305.html>).

Hasil pertanian di Bantul cukup bervariasi mulai dari beras, cabai merah, kacang, kedelai, jagung, tembakau, dan juga bawang merah. Produksi padi di Bantul mampu mengalami surplus. Dalam hal produksi bawang merah dan lombok (cabai merah) di Kecamatan Sanden yang merupakan salah satu daerah sentra produk tersebut. Ketika harga cabai dan bawang merah tinggi petani memperoleh keuntungan besar, hal ini terlihat dengan meningkatnya pembelian motor baru oleh petani cabai. Akan tetapi jika harga anjlok, bawang di sawah dibiarkan membusuk tanpa dipanen karena biaya panen lebih tinggi dari harga jual.

Dengan demikian masalah mendasar yang selalu dihadapi para petani adalah penurunan harga ketika panen raya tiba. Situasi ini membuat petani merugi dan berdampak pada keberlanjutan usahanya. Rendahnya harga hasil pertanian di tingkat petani tidak selalu disebabkan oleh banyaknya penawaran (stok), namun seringkali terjadi karena permainan pedagang besar. Jika hal ini dibiarkan, dampak besar yang ditimbulkan dapat menambah angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dan hilangnya gairah bertani masyarakat. Hal ini secara umum nampak dari tingginya angka konversi sawah ke non sawah yang mencapai angka 187.720 ha per tahun (secara nasional)² dan 712,496 ha pertahun untuk

² Kementerian Pertanian, *Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014*, Kementerian Pertanian, hal 21. Secara nasional, luas baku lahan sawah mengalami penyusutan dari 8,3 juta ha pada tahun 1990 menjadi 7,8 juta ha pada tahun 2005 (Wahyunto, 2009).

Bantul.³

Melihat kondisi yang demikian, sejak tahun 2002 Pemerintah Bantul mengeluarkan kebijakan pembelian produk pertanian agar petani tidak terus menerus menderita kerugian. Pemkab Bantul bersedia membeli hasil pertanian melebihi harga pasar dengan tujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melihat:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sosial Pemkab Bantul untuk pembelian hasil panen?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Bantul?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan dampak kebijakan pengamanan harga pasca panen yang dilakukan Pemkab Bantul. Selain itu juga ingin melihat faktor penghambat dan akibat kebijakan tersebut bagi keuangan daerah. Adapun secara teoritik tulisan ini bermanfaat untuk mempublikasikan kepada khalayak umum tentang dampak positif kebijakan pasca panen di Bantul. Dengan demikian pemerintah di daerah lain juga bisa mengikuti program kebijakan yang telah dibuat Pemkab Bantul. Bagaimanapun sektor agraris merupakan penopang keamanan dan kedaulatan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini juga meyakinkan dan menyarankan Pemkab Bantul untuk melanjutkan program, meskipun terjadi suksesi kepemimpinan yang berganti-ganti.

C. Tinjauan Pustaka

Terdapat dua penelitian yang mengulas program

³ Konversi lahan sawah menjadi bangunan dan tanaman tahunan dari tahun 1996 sampai 2006 di Bantul sekitar 40,10% (Dja'far Siddieq, dkk, 2010). Di Yogyakarta selama 18 tahun (1981-1998) terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian sebesar 20.000 ha atau 823 ha pertahun (Irawan dan Friyatno, 2002). Menurut Sekda Bantul konversi lahan hanya 5 ha pertahun, baca 108CSR.com, *2.000 Hektare Lahan Pertanian di Bantul Boleh Dialih Fungsikan* 18 Oktober 2012 dan Solopos, *Lahan Susut, Bantul Terancam Kurang Pangan*, 22 Oktober 2010.

pengamanan harga pasca panen di Bantul, yaitu penelitian Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) dan Siti Syamsiyar (2007). Tulisan yang kedua mengulas tentang bagaimana pelaksanaan program, sedangkan tulisan pertama mengulas tentang evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Keduatulisan ini menyimpulkan bahwa program pembelian panen petani dirasakan besar manfaatnya bagi para petani. Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) menyimpulkan bahwa mayoritas petani di Bantul, yaitu 98,86 % puas dengan kebijakan pembelian hasil pertanian. Para petani di Bantul mulai merasakan rasa tenteram terbebas dari rasa takut akibat harga jual yang tidak stabil dan merugi ketika panen raya tiba. Meskipun demikian Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) juga memberikan beberapa kritik terhadap kebijakan tersebut, yaitu tersentralnya program pembelian hasil panen menyebabkan petani harus menanggung biaya untuk mengangkut produksi hasil pertanian dan mereka juga harus antri cukup panjang.

Selain dua penelitian yang punya kaitan langsung dengan tulisan ini, terdapat tulisan Pajar Hatma Indra Jaya (2003) yang menyoroti perilaku "emoh-nya" anak petani untuk melanjutkan usaha di sektor pertanian. Perilaku tersebut muncul karena mereka menyadari bahwa menjadi petani tidak akan pernah membuat mereka sejahtera karena pemerintah selalu membuat kebijakan yang selalu menstabilkan harga. Ketika harga beras naik dan petani baru akan menikmatinya, pemerintah buru-buru impor beras. Dengan demikian pemerintah tidak akan rela jika harga beras menjadi tinggi, menjadi petani hanya akan menjadi tumbal pembangunan.

Tulisan ini mencoba mengungkap sisi-sisi lain dari kebijakan sosial tersebut, di mana ada kemungkinan celah untuk dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Bahwa kebijakan tersebut harus terus dilakukan dengan pola yang lebih terstruktur dan berkreasi agar sama-sama untung. Sebuah program pemberdayaan akan berjalan secara *sustainable* jika obyek sasaran mendapat untung dan pelaku pemberdayaan juga mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut.

D. Kerangka Teori

Petani dapat dibedakan menjadi *peasant* dan *farmer*. *Peasant* secara sederhana diartikan sebagai petani kecil (petani tradisional) yang usahanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan *farmer* dapat diartikan sebagai petani dengan lahan yang luas dan usaha pertaniannya dijual untuk bisnis (Eric Wolf, 1983: 2). Petani di Indonesia sebagian besar bertipologi sebagai *peasant* yang mendahulukan keharmonisan, pertimbangan moral, dan solidaritas daripada pertimbangan nalar ekonomi.

Menurut James C Scott (1981; 2000) ketika petani (*peasant*) mendapatkan ketidakadilan, mereka tidak akan melakukan perlawanan secara terbuka dan terang-terangan lewat pengorganisasian masa (kolektif), namun melakukan resistensi. Resistensi merupakan strategi perlawanan dengan maksud untuk mempertahankan diri dengan cara-cara lunak demi kelangsungan hidupnya. Perlawanan dengan metode ini kadang tidak dianggap sebagai bentuk perlawanan karena tindakannya tidak mengancam pemilik kuasa. Bentuk resistensi antara lain, tidak ikut dalam gotong royong, berbohong, ngemplang, sabotase. Menurut Scott bentuk perlawanan yang tidak frontal-langsung tersebut terjadi karena moralitas petani yang lebih mementingkan keselarasan (“keselamatan”) dibanding konflik.

Teori Scott mendapat kritik dari Samuel Popkin (1979).⁴ Popkin berpendapat bahwa tindakan petani terjadi tidak semata-mata hanya karena moralitas tinggi petani, namun dilakukan karena pertimbangan rasional dalam memperkirakan kemampuan dan untung rugi dari bentuk perlawanan yang harus ia pilih. Tindakan petani tidak semata-mata hanya didorong nilai-nilai moral, namun juga memperhitungkan untung rugi. Resistensi lahir dari kesadaran

⁴ Perbedaan interpretasi antara James C Scott dan Popkin nampak ketika menjelaskan kasus, mengapa petani lebih suka mengambil tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar rumah daripada orang luar yang lebih terampil? Scott menjelaskan tindakan tersebut dengan konsep moralitas tinggi petani, yaitu petani mempunyai kepedulian sosial yang tinggi untuk berbagi dengan tetangga, sedangkan menurut interpretasi Popkin hal itu terjadi bukan atas pertimbangan moral, namun lebih pertimbangan rasional (untung rugi). Dengan mempekerjakan orang sekitar maka ia lebih bisa mengontrol pekerjaannya dan dapat melanggengkan relasi kuasa dengan tetangganya. Lihat Hayami dan Kikuchi (1981) dalam Sudarmawan Juwono, *Teori Tindakan Rasional Dan Moral* dan Rustinsyah (2011).

untuk memilih tindakan yang terbaik. Ketika petani menghadapi situasi krisis karena mereka selalu dimarginalkan lewat kebijakan impor maka ia akan mengambil ancang-ancang untuk beralih ke pekerjaan lain karena cara itu lebih menguntungkan daripada protes kepada penguasa dengan jumlah masa yang banyak.⁵

Agar petani tidak beralih pekerjaan maka ia harus merasakan manfaat dari pilihan pekerjaannya, untuk itu negara harus hadir membantu para petani. Merujuk UU Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, terdapat 4 cara intervensi sosial agar masyarakat merasakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Intervensi tersebut adalah rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Dari empat macam intervensi tersebut, negara dapat memilih perlindungan sosial⁶ dengan memberikan subsidi demi terjaganya kedaulatan pangan. Namun perlu dicatat, pemberian subsidi yang tidak tepat terkadang melahirkan efek negatif berupa ketergantungan masyarakat terhadap negara.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yang bermaksud memberi masukan guna pengembangan suatu kebijakan pemerintah (Etta Mamang Sangadji, 2010: 19). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bantul, secara lebih khusus kelompok tani yang pernah mendapat manfaat dari program pembelian pasca panen. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2012 sampai Oktober 2012 dengan metode pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), *interview* (wawancara),

⁵ Lihat Oetami Dewi, Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis, Jurnal Informasi, Vol 12, No 2, Tahun 2007, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2007, Rustinsyah, *Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume 24, Nomor 2, 2011, Unair, Surabaya, Samuel Popkin. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press, 1979.

⁶ Menurut UU Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan kepada semua orang yang mengalami keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

dan studi dokumentasi.

Observasi digunakan untuk mengamati strategi petani ketika menghadapi penurunan harga, sedangkan dokumentasi dicari dari data pembelian hasil pertanian yang pernah dilakukan Pemkab Bantul. Wawancara dilakukan kepada 1). Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Informasi yang dicari antara lain sejarah dan mekanisme pelaksanaan program. 2). Masyarakat penerima manfaat. Informasi yang dicari adalah cerita tentang manfaat dan kekurangan yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut.

F. Munculnya Ide: "Suara Rakyat = Suara Tuhan"

Sejak 1998 Indonesia memasuki orde reformasi, dalam orde ini demokrasi menjadi sistem yang diunggulkan, "suara rakyat adalah suara Tuhan". Pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengatur daerahnya dengan sistem otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang original untuk mensejahterakan atau memenuhi keinginan masyarakat. Sistem tersebut menuntut kepala daerah responsif dengan keluhan masyarakat. Kepala daerah harus membuka diri untuk menampung aspirasi. Kepala daerah yang mau "tilik" warganya menjadi idola masyarakat. Pada periode pertama reformasi, Bantul dipimpin oleh Drs. H.M. Idham Samawi. Beliau seringkali terjun langsung dan *sharing* bersama masyarakat.

Tahun 2001, Bupati Bantul mendapatkan keluhan dari petani bahwa harga beras cukup rendah, tidak sebanding dengan harga pupuk. Keluhan yang bertubi-tubi dari "*wong bantul*" ini direspon baik oleh bupati dengan munculnya Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2001 tertanggal 1 Oktober 2001 terkait kebijakan pembelian gabah.⁷

Kegiatan pembelian gabah mulai dilakukan pada tahun 2002 dan ditanggapi dengan baik oleh para petani, para petani sangat senang dengan kebijakan ini. Keluhan yang sama dengan masalah yang serupa juga muncul dari petani bawang merah dan cabai. Harga kedua komoditas tersebut tidak mudah diprediksi. Harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, namun terasa ada permainan pengusaha-pengusaha besar. Harga cabai untuk setiap satu

⁷ Wawancara dengan bendahara Tim Pasca Panen, Bapak Subari, pada tanggal 28 September 2012.

kilogram terkadang bisa mencapai Rp. 100.000,-, namun secara tiba-tiba bisa turun drastis menjadi Rp. 2.000,- Oleh karena keluhan itu maka muncullah keputusan Bupati Bantul Nomor 12A Tahun 2003 pada tanggal 31 Januari 2003.

Keputusan baru tersebut memperluas cakupan kebijakan pembelian produk pertanian menjadi tujuh komoditas penting yang dihasilkan petani Bantul. Tidak hanya beras yang harga jualnya dilindungi, namun juga padi, jagung, kedelai, kacang tanah, bawang merah, cabai merah, dan tembakau. Namun hanya padi, bawang merah, jagung, dan cabai yang sering mendapat alokasi karena harganya paling sering mengalami fluktuasi, sedangkan tiga komoditas yang lain harganya relatif masih wajar.

Kebijakan pembelian produk pertanian ketika harganya turun tersebut adalah kebijakan original dari Bantul.⁸ Kebijakan tersebut muncul karena dalam era demokrasi bupati mempunyai ruang untuk membuat kebijakan yang berbeda. Di tingkat pusat sebenarnya ada Bulog (Badan Urusan Logistik), namun dalam kinerjanya lebih sering menurunkan harga beras daripada menaikkan. Lebih sering mendukung kebijakan impor beras daripada ekspor.

Kebijakan pembelian harga beras merupakan salah satu kebijakan subsidi harga dalam konsep *social welfare*. Mungkin orang yang mempunyai ideologi kapitalis menganggap kebijakan tersebut irasional, namun kebijakan tersebut sesuai dengan amanat negara untuk melindungi rakyatnya. Campur tangan negara untuk melindungi rakyatnya sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Bantul, Amerika yang dianggap sebagai penganut Ideologi kapitalisme juga melakukannya.

Akibat dari praktek kebijakan melindungi petani membuat masyarakat Bantul menyayangi Drs. H.M. Idham Samawi dengan memilihnya pada periode kedua. Bahkan jika tidak dibatasi masyarakat ingin memilihnya untuk yang ketiga kalinya. Karena kebijakan yang populis pro rakyat itu pula yang mengantar Hj. Idham Samawi menggantikan posisi

⁸ Ketika memantau turunnya harga bawang merah di Brebes, menteri pertanian mengatakan pemda harus tanggap dengan persoalan petani sehingga tidak perlu intervensi pemerintah pusat untuk menangani persoalan tersebut. Menurutny Brebes dapat meniru apa yang telah dilakukan Pemkab Bantul dengan menyiapkan dana pembelian komoditas pertanian jika harganya turun. www.panturanews.com, *Menpan: Saya Beli Bawang Hanya Menyindir Pemda*, 30 Juli 2011.

suaminya.

G. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan pasca panen menggunakan dua mekanisme, 1). Manajemen keluhan, 2). Manajemen jempot bola. Metode pertama dilakukan ketika petani merasakan turunnya harga komoditas pertanian dan melaporkannya ke petugas baik tingkat kecamatan atau dinas di kabupaten. Metode kedua dilakukan secara langsung oleh petugas melalui pemantauan harga ketika mengetahui bahwa harga pertanian turun melampaui harga standar. Bila harga pasar anjlok di bawah harga dasar saat panen raya tiba, tim pasca panen langsung terjun ke masyarakat.

Dalam mekanisme kerja model manajemen keluhan, ketika petani merasakan rendahnya produk pertanian mereka dapat menyampaikan informasi ke petugas pertanian di kecamatan atau langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Jika laporan disampaikan di kecamatan maka pihak perwakilan dinas pertanian kemudian mengadakan keluhan dengan mengirimkan surat resmi ke kabupaten mengenai kondisi yang terjadi. Atas informasi yang telah diterima tersebut petugas pertanian mencatat asal kelompok tani yang melapor dan segera meneruskannya ke petugas terkait di kabupaten. Selanjutnya petugas di kabupaten segera melakukan koordinasi, memeriksa harga pasar, dan meminta petani untuk mengumpulkan hasil pertaniannya di satu lokasi yang dekat dengan area kelompok tani itu berasal. Selanjutnya petugas langsung melakukan pembelian sesuai harga dasar yang ditetapkan. Proses pembayaran dilakukan secara langsung setelah warga mengumpulkan hasil pertaniannya. Bila harga komoditas kembali normal sesuai harga dasar, operasi pasar dihentikan dan petani dipersilakan menjualnya ke pasar.

Jika laporan langsung disampaikan ke dinas, prosesnya tidak jauh berbeda karena dinas akan menghubungi petugas perwakilan di tingkat kecamatan. Atas informasi yang telah diterima tersebut, petugas pertanian langsung mendata dan mencatat asal kelompok tani yang melapor dan segera meneruskannya ke dinas pertanian (petugas terkait di kabupaten). Prosedur selanjutnya sama dengan mekanisme ketika keluhan disampaikan ke kecamatan.

Multiple efek: Biasanya terjadi ketika pedagang mengetahui

bahwa pemerintah akan membeli hasil panen dari para petani, mereka pun ikut serta membeli hasil panen dengan harga sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal ini cukup berpengaruh pada kembali normalnya harga pertanian.

Dana pembelian dari kegiatan pasca panen ini diperoleh dari dana APBD tahun 2001 sebesar 1,5 milyar dan tahun 2002 sebesar 2 milyar. Dana ini digunakan seefisien mungkin agar dapat bertahan lama. Dana tersebut digunakan hanya bila harga komoditas pertanian berada di bawah harga dasar yang telah ditetapkan. Jika harga produk pertanian lebih tinggi dari harga dasar maka petani dipersilahkan untuk menjualnya ke pasar. Dengan demikian pemerintah tidak harus selalu mengeluarkan uangnya, seperti pada tahun 2009 pemerintah tidak melakukan pembelian.

Dana pemerintah tersebut pernah bertambah menjadi 3.757.029.621 pada tahun 2003 karena bunga deposito bank, namun karena tidak diperbolehkan dimasukkan ke bank maka pada tahun berikutnya tidak ada pemasukkan bunga.⁹ Saat ini dana tersebut masih tersisa sekitar 1,6 milyar. Adapun anggaran terbesar yang dikeluarkan tim pasca panen sejak 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 301.062.000 pada tahun 2010 untuk pembelian gabah kering. Lihat tabel I di bawah ini:

Tabel I
Sejarah Program Pembelian Hasil Pertanian

No	Tahun	Kebijakan	Anggaran
1.	2008	Jagung, Gabah dan Beras	64.534.000
2.	2009	Tidak terjadi pembelian	-
3.	2010	Gabah Kering	301.062.000
4.	2011	Gabah Kering	179.322.630
5.	2012	Gabah Kering	68.067.900

Sumber: Data primer Dinas Pertanian Bantul

Dari setiap transaksi pemerintah berani memberikan subsidi sampai Rp 800,- perkilogram. Sebagai contoh pada tahun 2003 ketika harga cabai di pasaran hanya Rp. 700,- sampai Rp. 1.200,- pemerintah berani membeli antara Rp. 1.500,- sampai Rp. 1.700,-

⁹Namun untuk keamanan, saat ini dana tersebut disimpan di bank kembali. Wawancara dengan St petugas Dinas Pertanian Pemkab Bantul pada tanggal 25 Oktober 2012.

Selain untuk pembelian gabah (pasca panen), dana yang banyak dikeluarkan dan sampai saat ini tidak kembali terjadi dalam kasus peminjaman dana kepada petani bawang merah ketika mereka tidak panen akibat banjir. Genangan air yang cukup lama membuat tanaman bawang merah busuk, padahal belum layak untuk dipanen. Jika dipanen harganya juga murah akibatnya terjadi gagal panen.

Situasi tersebut membuat petani tidak punya bibit untuk ditanam pada musim berikutnya. Mendapat keluhan petani, Bupati Bantul secara sigap memerintahkan aparat untuk membantu mengatasi dengan memunculkan program kredit untuk pembelian bibit bawang merah. Sesuai perjanjian, pinjaman tersebut dikembalikan ketika panen tiba. Celakanya, meski ada surat perjanjian resmi bahwa mereka harus mengembalikan pinjaman ketika panen tiba, namun mereka tidakpunyaniatbaikuntukmengembalikanpinjaman. Pemkab telah berusaha jemput bola dengan menyebar pegawainya untuk menagih dari rumah ke rumah, namun hasilnya belum maksimal dibanding dengan tenaga tagih yang dikeluarkan Pemkab. Meskipun beberapa petani mengangsur pinjaman, namun lebih banyak lagi petani yang mengatakan tidak mempunyai uang. Ketidakmampuan negara menghadirkan *punishment* sudah nampak dari program Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 2000, di mana lebih dari 82,3% kredit petani tidak kembali dan negara membiarkannya dengan alasan program tersebut adalah katub pengaman masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi 1998. Efek dari tindakan tersebut adalah timbulnya mentalitas “ngemplang” pinjaman negara (Ernany, 2002: 2).

Di sisi lain, di era demokrasi langsung, petani yang jumlahnya banyak punya kekuatan yang menentukan bagi menang kalahnya kompetisi dalam pemilu. Berdasarkan logika tersebut tidak mungkin terjadi penarikan kredit secara paksa kepada petani. Jika itu dilakukan dukungan petani kepada penguasa dapat dicabut, apalagi melindungi masyarakat merupakan kewajiban negara.

H. Dampak Kebijakan: Dari Untung Rugi Menjadi Untung-Untung

Kebijakan pembelian komoditas pertanian ketika harga turun memberikan dampak positif bagi para petani, mereka

tidak akan merasa takut menghadapi kerugian saat panen raya karena pemerintah siap membeli produk mereka di atas harga pasar ketika harga jatuh. Berdasarkan studi Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) disimpulkan bahwa mayoritas petani di Bantul, yaitu 98,86 % puas dengan kebijakan pembelian hasil pertanian. Temuan tersebut sesuai pendapat Bapak Mardiyo, Ketua Gapoktan Gemah Ripah Desa Pendowoharjo, yang mengatakan kebijakan tersebut sangat baik karena membantu dalam mencegah terjadinya kerugian petani. Dengan demikian kebijakan pembelian komoditas pertanian pasca panen ini sudah sangat bagus karena membantu mengurangi kerugian masyarakat saat terjadinya panen raya.

Dilihat dari pemerintah, karena proses pembelian dilakukan hanya ketika harga barang jatuh di bawah biaya produksi atau tidak sampai menutupi modal awal maka pemerintah selalu “merugi”. Namun inilah konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah sebagai tugasnya melindungi masyarakat. Meskipun akan lebih baik lagi jika pemerintah tidak merugi dalam proses intervensi ini.

Namun demikian meruginya pemerintah bukan satu kejadian yang harus disesali. Jika petani dibiarkan menanggung sendiri kerugiannya akan menimbulkan dampak psikologi berupa sikap “emoh” bertani, akibatnya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara.

Menurut teori *punish* dan *reward* dan juga konsep petani rasional, jika seorang mendapat satu ketidakenakan dari satu kejadian maka dia tidak akan mengulangi perilakunya tersebut. Oleh karena itu kekhawatiran yang lebih besar dari dampak sengsaranya petani adalah terjadinya konversi lahan dan pekerjaan ke non-pertanian yang saat ini telah terasa. Hampir semua anak petani tidak ingin bekerja di sektor pertanian dan hampir semua petani tidak mencita-citakan anaknya menjadi petani. Dengan demikian dalam jangka panjang perlindungan kepada petani ini tidak merugikan negara terutama terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Apalagi kerugian ekonomi negara juga tidak terlalu besar untuk mendukung kebijakan ini.

Dalam kurun waktu mulai tahun 2002 sampai 2012 atau 10 tahun Pemkab Bantul mengeluarkan 1,9 milyar. Hal ini berarti dalam setahun rata-rata mengeluarkan sekitar 190 juta

atau dalam sebulan mengeluarkan 15,8 juta. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah anggaran studi banding anggota DPR pada bulan september tahun 2012 yang menghabiskan anggaran Rp 1,3 miliar.¹⁰ Meskipun demikian perlu ada terobosan agar kebijakan ini tidak merugikan pemerintah, namun malah menguntungkan.

Saat pemerintah membeli hasil panen petani dengan harga di atas harga pasar di Bantul, agar tidak merugi pemerintah dapat menjual kembali ke daerah yang harga cabainya lebih tinggi. Seperti contoh pembelian cabai, pemerintah menjualnya dalam kondisi masih basah atau kadang sudah dikeringkan yang selanjutnya dititipkan lewat pedagang besar ke pasar induk Jakarta. Jika hasil pertaniannya berupa gabah, lebih mudah lagi, tim pasca panen dapat menyimpannya terlebih dahulu dan menjual kembali pada saat harga gabah naik. Jadi antara pemerintah dan petani saling diuntungkan sehingga sirkulasi dana yang dimiliki pemerintah berjalan normal. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antar daerah ketika di satu daerah harga komoditas tinggi, namun di daerah lain rendah bisa dijalin kerja sama pemindahan komoditas.

I. Kesimpulan dan Saran

Kebijakan pasca panen merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mengurangi kerugian petani akibat rendahnya harga jual produk pertanian. Walaupun dalam kebijakan pasca panen ini pemerintah mengalami kerugian, namun hal itu merupakan bentuk solidaritas pemerintah terhadap nasib petani. Dengan perlindungan ini masyarakat akan tetap semangat untuk terus bekerja di sektor pertanian. Apa yang terjadi dengan Indonesia jika petani “emoh” menanam padi lagi, Indonesia akan tergantung dengan bangsa lain. Intervensi pemerintah semacam ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, Amerika pun sebagai negara penganut kapitalisme juga melakukan hal ini.

Dalam proses pemberdayaan berlaku prinsip sama-sama untung, yang diberdayakan dan yang memberdayakan tidak boleh ada yang rugi. Kondisi sama-sama untung akan menjamin keberlanjutan program ini. Untuk itu diperlukan strategi baru untuk mewujudkan situasi yang sama-sama

¹⁰ <http://situs-beritaterbaru.blogspot.com/2012/09/cuma-soal-logo-pmi-22-anggota-dpr-studi.html>, diakses pada 04 oktober 2012.

untung. Berdasarkan hasil penelitian ini, hal yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terus menerus menanggung kerugian adalah:

1. Tindakan preventif, yaitu tindakan untuk mencegah agar petani tidak menemui harga rendah ketika panen raya tiba. Hal ini dilakukan dengan cara penguatan kemampuan petani untuk dapat membaca kalender musim dan perulangan fluktuasi harga pasar.
2. Pemindahan, yaitu peran pemerintah sebagai broker/fasilitator. Jika harga komoditas pertanian di Bantul memang turun dan petani sedang panen maka pemerintah dapat membukakan akses ke pasar yang lebih luas sehingga harga jual tetap tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirim hasil pertanian ke daerah lain, ke luar negeri, atau bekerja sama dengan industri yang membutuhkan.
3. Pengemasan produk untuk dijual dalam bentuk barang jadi atau kemasan yang siap konsumsi. Misalnya mengolah cabai merah menjadi sambal kemasan. Hal ini bisa dilakukan jika industri cabai yang ada tidak mau menyerap produk pertanian Bantul.
4. Penyimpanan. Pemerintah membeli dan menyimpan barang untuk dijual kembali ketika harga telah normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media. Yogyakarta, 2004.
- Dja'far Siddieq, dkk, *Pemanfaatan Citra Landsat TM Pada Pemetaan Dampak Konversi Lahan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Di Propinsi D.I. Yogyakarta Dan Bali*, UGM dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Yogyakarta, 2010.
- Eric R Wolf, *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Ernany dkk, *Efektivitas Program Kredit Mikro dan Kecil: Kasus KUT, P2E-LIPI*, Jakarta 2002.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Irawan dan Friyatno, *Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Pengendaliannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor, Soca Vol. 2, No.2, 2002.
- James C Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES, Jakarta, 1981.
- James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, Yayasan Obor, Jakarta, 2000.
- Kementrian Pertanian, *Rancangan Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2010-2014*, Kementrian Pertanian, hal 21. Di unggah 29 Januari 2013 di <http://setjen.deptan.go.id/admin/download/rancangan%20renstra%20deptan%202010-2014%20lengkap.pdf>.
- Oetami Dewi, *Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis*, *Jurnal Informasi Vol 12, No 2, Tahun 2007*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2007.

- Pajar Hatma Indra Jaya, *Transformasi Tenaga Kerja Pedesaan: Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Perubahan Mata Pencarian Penduduk Desa Antar Generasi, dari Sektor Agraris Ke Sektor Non Agraris Di Desa Mulyodadi, Kec Banglilipuro, Kab. Bantul, UNS, Surakarta, 2003.*
- Rustinsyah, Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume 24, Nomor 2, 2011, Unair- Surabaya, 2011.*
- Samuel Popkin. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam.* Berkeley: University of California Press, 1979.
- Sigit Nugraha, *Evaluasi Program Pengamanan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian di Kabupaten Bantul, Tesis Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2005.*
- SitiSyamsiyar, *Upaya Pemberdayaan Petani Bawang Merah Melalui Kebijakan Harga di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2003-2005), Tesis Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2007.*
- Sudarmawan Juwono, *Teori Tindakan Rasional dan Moral,* sukawayang.wordpress.com, diakses 31 Januari 2013.
- Wahyunto, Lahan Sawah di Indonesia sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Nasional, *Warta Informatika Pertanian, Volume 18 No. 2, 2009, Badan Litbang Pertanian, Jakarta, 2009.*

Internet:

- <http://108CSR.com>, 2.000 Hektare Lahan Pertanian di Bantul Boleh Dialih Fungsikan, 18 Oktober 2012, <http://www.108csr.com/default/news/2012/10/18/21194/2-000-Hektare-Lahan-Pertanian-di-Bantul-Boleh-Dialih-Fungsikan>.
- <http://bisnisukm.com/potensi-bisnis-budidaya-bawang-merah.html> diakses pada 07 Agustus 2012.
- <http://www.bantulonline.com/2011/07/areal-pertanian-bantul-capai-15305.html>.
- <http://situs-beritaterbaru.blogspot.com/2012/09/cuma-soal-logo-pmi-22-anggota-dpr-studi.html>, diakses pada 04 oktober 2012.

Solopos, *Lahan Susut, Bantul Terancam Kurang Pangan*, <http://www.solopos.com/2010/10/22/lahan-susut-bantul-terancam-kurang-pangan-142704>, diunduh tanggal 29 Januari 2013.

www.panturanews.com, *Menpan: Saya Beli Bawang Hanya Menyindir Pemda*, 30 Juli 2011.

